

BAB II
PENELITIAN TERDAHULU, KAJIAN TEORI,
DAN KERANGKA KONSEP

2.1 Penelitian Terdahulu

2.1.1 Pemetaan Penelitian Terdahulu

Dalam tinjauan pustaka ini penulis mendapatkannya dari penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Berikut di bawah ini tabel penjelasan mengenai penelitian terdahulu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

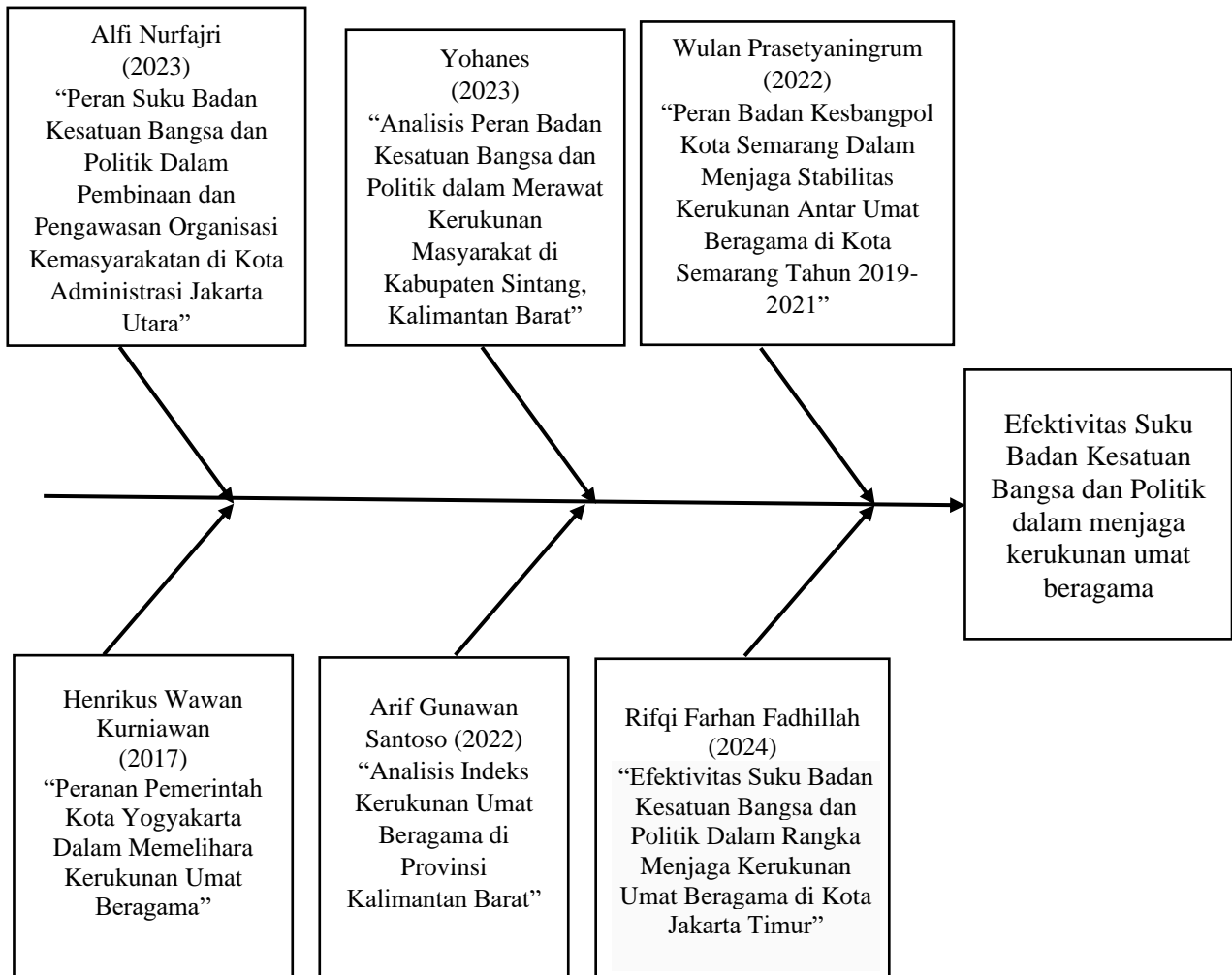
No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Alfi Nurfajri (2023)	Peran Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. http://eprints.ipdn.ac.id/14404/1/Alfi%20Repository.pdf	Kesbangpol Suku Badan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Ormas telah bekerja secara optimal namun diperlukan tindakan yang lebih tegas terhadap Ormas yang melakukan pelanggaran, dengan faktor-faktor penyebab pelanggaran yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Utara, antara lain: persaingan daerah, perbedaan pandangan, kondisi situasional, kondisi organisasi, dan tuntutan yang tidak terpenuhi terhadap pemerintah.
Perbedaan penelitian: Fokus penelitiannya pada peran organisasi dalam pembinaan dan pengawasan ormas sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada efektivitas organisasi dari suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.			
2.	Yohanes (2023)	Analisis Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Merawat Kerukunan Masyarakat di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/1486	Peran efektif Badan Kesbangpol dalam membangun dan mengembangkan kerukunan dari teori efektifitas organisasi sudah cukup efektif. Hal ini terlihat dari kemampuan badan Kesbangpol dalam melaksanakan berbagai agenda dan program pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan secara baik melalui sosialisasi dan

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			edukasi kepada masyarakat, pemuda dan intitusi pendidikan. Peran membina kehidupan demokrasi dan keberagaman sosial, Badan Kesbangpol masih belum efektif karena ketidakmampuan Kesbangpol mencegah terjadinya konflik politik dan SARA di tahun 2019-2021.
	Perbedaan penelitian: Fokus penelitian pada peran organisasi dalam merawat kerukunan umat beragama, sedangkan pada penelitian penulis memfokuskan pada efektivitas organisasi dalam merawat kerukunan umat beragam di wilayah Jakarta Timur.		
3	Wulan Prasetyaningrum (2022)	Peran Badan Kesbangpol Kota Semarang Dalam Menjaga Stabilitas Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Semarang Tahun 2019-2021 https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20209/1/Skripsi_1806016015_Wulan_Prasetyaningrum.pdf	Hasil penelitian yang dilakukan mendapatkan temuan bahwa menurut konsep teori peran serta startegi komunikasi politik komunitas beragama, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang telah berperan dalam upaya menjaga stabilitas kerukunan antara umat beragama di Kota Semarang dalam kurun waktu 2019-2021. Hal ini sesuai dengan peran Kesbangpol dalam menciptakan kebijakan kerukunan antar umat beragama.
	Perbedaan penelitian: Fokus penelitian pada peran Kesbangpol dalam menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama, sedangkan peneliti memfokuskan pada efektivitas organisasi/ Kesbangpol		
4	Henrikus Wawan Kurniawan (2017)	Peranan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama https://eprints.uny.ac.id/53167/5/Ringkasan%20Skripsi%2013401241032.pdf	Peranan pemerintah kota Yogyakarta dalam memelihara kerukunan umat beragama meliputi; a) sebagai fasilitator, pemerintah memberdayakan dan memfasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan memfasilitasi pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan serta tokoh agama dalam program pemantapan cinta tanah air dan nasionalisme. B) sebagai koordinator, pemerintah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan FKUB, pengkoordinasian dengan instansi vertikal pemerintahan, pembinaan dan pengkoordinasian camat dan lurah dalam musyawarah rencana

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			pembangunan (Musrembang) serta koordinasi terkait penyelesaian konflik. C) regulator, pemerintah menerbitkan surat ijin mendirikan bangunan rumah ibadah sesuai dengan rekomendasi FKUB.
	Perbedaan penelitian: Penelitian dilakukan untuk melihat sejauhmana pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama, sedangkan pada penelitian penulis difokuskan sejauhmana efektivitas kesbangpol dalam merawat kerukunan umat beragama.		
5	Arif Gunawan Santoso (2022)	Analisis Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kalimantan Barat https://doi.org/10.19109/intizar.v28i2.14113	Indeks kerukunan umat beragama termasuk dalam kategori indeks tinggi dengan skor 79.11 untuk kerukunan umat beragama di Provinsi Kalimantan Barat. Secara spesifik dimensi toleransi dan kerjasama terkategori tinggi dan dimensi kesetaraan terkategori sangat tinggi.
	Perbedaan penelitian: Fokus penelitian untuk menganalisis indeks kerukunan umat beragama di Kalimantan Barat, sedangkan penulis fokus pada sejauhmana efektivitas dari kesbangpol untuk merawat kerukunan hidup umat beragama di wilayah Jakarta Timur.		
	Perbedaan penelitian: Fokus penelitian mengenai efektivitas anggaran Kesbangpol, sedangkan penulis fokus pada sejauhmana efektivitas dari kesbangpol untuk merawat kerukunan hidup umat beragama di wilayah Jakarta Timur.		

2.1.2 Diagram *Fishbone*

Tabel 2.2
Diagram *Fishbone*



2.1.3 Kebaruan Penelitian

Pada tabel pemetaan penelitian terdahulu dan diagram *fishbone* yang telah diuraikan menunjukkan bahwa terdapat peneliti-peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian terkait variabel efektivitas dari suatu instansi. Suatu analisis efektivitas dari masing-masing instansi pemerintah salah satunya dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai masukan serta bahan pengkajian dengan permasalahan yang sedang diteliti saat ini, yakni **Efektivitas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Rangka Menjaga Kerukunan Umat**

Beragama di Jakarta Timur. Hubungan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diantaranya yaitu kesamaan variabel penelitian yang membahas mengenai efektivitas dan lokasi penelitian yaitu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus yang diteliti, teori yang digunakan, metode dan jenis penelitian, hasil penelitian yang berbeda, jumlah variabel yang berbeda, dan belum pernah dilakukannya penelitian pada Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Timur.

Peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **Efektivitas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Rangka Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Jakarta Timur** dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjaga kerukunan umat beragama di wilayah Jakarta Timur, membantu menyelesaikan permasalahan yang ada pada Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, memberikan solusi/arahan agar Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat lebih efektif menjalankan tugas dan tanggung jawabnya khususnya dalam menjaga kerukunan umat beragama di Jakarta Timur.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Organisasi

Organisasi dalam kata bahasa Belanda *organisatie* merupakan sekumpulan dari sejumlah orang, dua orang atau lebih dalam sebuah wadah yang sama dan memiliki satu tujuan bersama yang memiliki sumber daya, materi, metode, uang, sarana-prasarana dan lingkungan yang mendukung terwujudnya tujuan organisasi (Ambarwati, 2019). Dalam konsep teori Organisasi adalah sebuah tujuan yang dirumuskan dan dibangun oleh mekanisme untuk mencapai target dan tujuan yang terukur. Salah satu teori organisasi yang sangat populer yang dipelopori oleh Scott dan kawan-kawan memiliki pandangan bahwa organisasi beradaptasi dengan lingkungan kelembagaan dan mengadopsi fitur-fitur yang dianggap sah dalam lingkungan kelembagaan yang lebih luas (Scott, 1961).

Dalam setiap organisasi atau lembaga setiap individu berinteraksi dengan semua struktur yang secara langsung maupun secara tidak langsung di dalam

organisasi yang dipilih. Dalam proses interaksi ini setiap individu dapat memahami peran, fungsi, tugas dan tujuan yang dicapai atau ditargetkan oleh organisasi. Partisipasi dalam organisasi akan melibatkan pikiran, perasaan, emosi, kemampuan dan keterampilan setiap individu yang bertujuan untuk mendorong agar setiap orang dan setiap lembaga berusaha untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, seimbang dan adaptif (Davis, 1962).

2.2.2 Efektivitas Organisasi

Efektivitas merupakan kemampuan atau tingkat keberhasilan suatu program serta tindakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi atau bisnis, efektivitas dapat diukur dengan seberapa baik organisasi tersebut mencapai tujuannya dalam hal pencapaian hasil yang diinginkan. Dalam konteks individu, efektivitas dapat diukur dengan seberapa baik seseorang dapat mencapai tujuan atau tugas yang diberikan dengan sumber daya yang tersedia.

Menurut (James L Gibson et al., 1985) seperti yang dikutip oleh Pasolong, efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama (Pasolong, 2013). Lebih lanjut James menambahkan bahwa derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian tujuan. Semakin mudah organisasi mencapai tujuan menunjukkan bahwa organisasi tersebut berjalan efektif. Menurut Gibson, konsep efektivitas organisasi dapat dipandang melalui tiga hal yaitu efektivitas individu, kelompok, dan organisasi (Gibson et al., 1985).

Pada efektivitas individu, hal yang kemudian ditekankan adalah pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab individu sebagai pekerja dari suatu organisasi. Keberhasilan atau prestasi seorang individu sangat berkaitan dengan kerja kolaboratif dalam kelompok, karena dalam suatu organisasi seorang individu pasti akan berhubungan langsung dengan kelompoknya dalam bekerja. Efektivitas kelompok menekankan pada kinerja tim dimana suatu tugas bersama yang seharusnya dikerjakan secara kelompok dan bukan perorangan. Efektivitas organisasi secara perseptual merupakan hasil efektivitas antara individu dan

kelompok atau dengan kata lain tingkat prestasi yang ditonjolkan adalah tingkat prestasi organisasi yang merupakan gabungan dari prestasi individu dan kelompok.

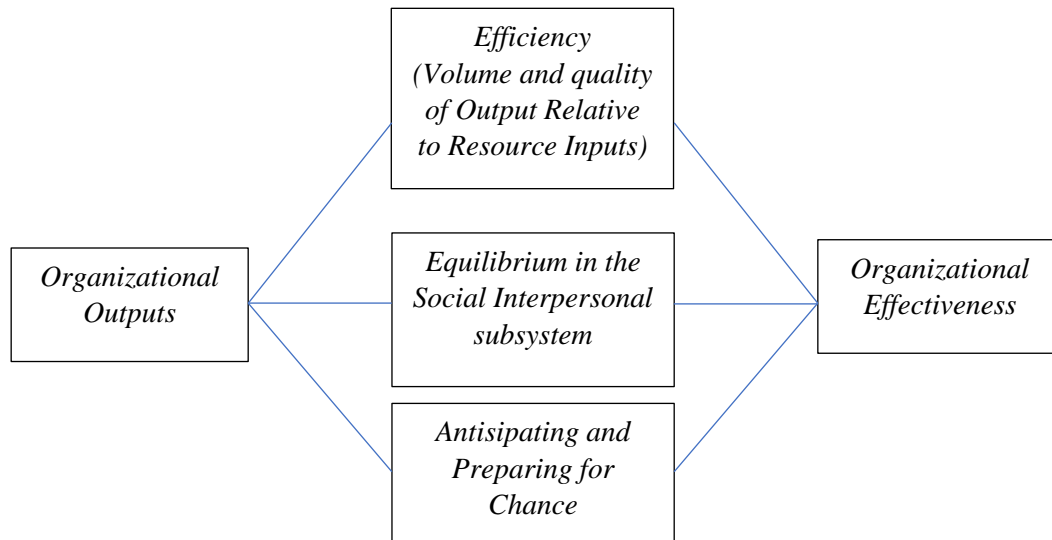
Ukuran efektivitas dapat ditentukan melalui tiga hal (Duncan dalam Steers, 2015), yaitu:

- (1) pencapaian tujuan,
- (2) integrasi, dan
- (3) adaptasi.

Pencapaian tujuan dipandang sebagai suatu proses dalam upaya mencapai tujuan, sedangkan integrasi merupakan pengukuran yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi, dan adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya (Duncan, 1973).

Menurut Duncan ada tiga elemen dasar dalam membangun efektivitas organisasi yaitu produktivitas (*productivity*), tekanan organisasi (*intra organizational stress*), dan fleksibilitas (*flexibility*). Produktivitas organisasi terkait dengan efisiensi, sedangkan tekanan organisasi dibuktikan melalui hasil pengamatan tingkat ketegangan dan konflik dalam suatu organisasi, dan fleksibilitas terkait dengan kemampuan organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan eksternal dan internal.

Steers mengembangkan model proses efektivitas yang mencakup tiga dimensi (Steers, 1975). Yakni (1) optimalisasi tujuan, dimana masing-masing tujuan organisasi mendapat perhatian dan sumber daya yang cukup, (2) perspektif sistem terbuka yang mengakui pentingnya interaksi antara organisasi dan lingkungan, (3) pentingnya perilaku manusia dalam mencapai kinerja organisasi.



Gambar 2.1 Elemen Efektivitas Organisasi Untuk Mencapai Tujuan Organisasi
Sumber: Duncan (1981:370)

Efektivitas organisasi dapat diketahui dari bagaimana peran penting dari Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimana dari sisi teori Duncan adalah peran keseimbangan (*equilibrium*) dalam organisasi dan kepemimpinan. Peran Suatu organisasi berperan efektif bila memenuhi tiga hal utama yaitu (1) melakukan pengorganisasian secara efisien, (2) menjaga keseimbangan dalam struktur sosial, dan (3) tetap fleksibel atau adaptif dengan perubahan. Peran ini dapat menjelaskan efektivitas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang perlu memiliki kapasitas dan kemampuan dalam menciptakan korelasi sub-sub sistem sosial antar pribadi dan kelompok dalam masyarakat (Duncan, 1973). Maksud dan fungsi dan peran *equilibrium* tersebut adalah Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus bisa membuat integrasi diantara subsub sistem, atau interaksi dan komunikasi antar unit dan bidang, komponen dalam lingkup pemerintahan dan masyarakat. Peran keseimbangan oleh Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah kemampuan dalam menyatukan individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan kelompok dengan masyarakat sehingga terciptanya harmonisasi semua elemen masyarakat.

Menurut (Ritzer & Goodman, 2010:121) adaptasi adalah sebuah sistem untuk mengatasi permasalahan yang bersifat eksternal, genting, mampu

menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kebutuhannya. Adaptasi juga berkaitan dengan kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan (*goal attainment*) yakni sebuah sistem yang menuntun organisasi mencapai tujuan utamanya dan mampu mendefinisikan tujuannya. Keseimbangan juga terbangun dari adanya proses integrasi (*integration*) yaitu sebuah sistem yang menghubungkan antara komponen yang satu, atau unit yang satu dengan unit lainnya sehingga unit-unit mampu mengelola fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama.

Dari beberapa teori, teori Duncan sangat cocok digunakan sebagai pisau analisis pada penelitian ini. Menurut Duncan dalam Steers (2015) dalam bukunya "Efektivitas Organisasi" mengatakan efektivitas dapat diukur dari indikator sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan.

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari faktor-faktor, yaitu: (1) kurun waktu pencapaiannya ditentukan, dan (2) sasaran merupakan target yang konkrit, dan (3) dasar hukum.

2. Integrasi

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) prosedur, dan (2) proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah pengukuran bagaimana sebuah organisasi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi merupakan kemampuan untuk mengubah atau menyelaraskan prosedur standar operasinya secara dinamis apabila lingkungannya mengalami perubahan. Dengan demikian adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) peningkatan kemampuan, dan (2) sarana dan prasarana

2.2.3 Konsep Kerukunan Masyarakat

Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan Tahun 2006, pasal 1 angka (1) menjelaskan makna kerukunan, yaitu kerukunan antarumat beragama adalah situasi atau keadaan suatu hubungan umat yang berbeda agama dengan dilandasi sikap dan pikiran toleransi, saling memahami, menghormati, menghargai kesetaraan didalam mengamalkan agamanya dan kerjasama dalam kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara. Pengertian ini menggambarkan bahwa kerukunan antarumat beragama tidak saja mencapai suasana batin yang penuh toleransi keberagaman, akan tetapi juga bagaimana cara mereka dapat saling bekerjasama (Ahmad Subakir, 2020:19).

Kerukunan diidealkan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian Pancasila. Kerukunan hidup umat beragama juga mengupayakan hadirnya sebuah tatanan sosial yang baik dimana semua golongan agama dapat hidup bersama-sama secara damai tanpa mengurangi hak dan kebebasan masing-masing, untuk menganut dan melaksanakan kewajibannya.

Dalam kemajemukan semua orang dapat hidup bersama tanpa ada kecurigaan, dimana tumbuh sikap saling menghormati dan bersedia berkerja sama dan berkolaborasi demi kepentingan bersama. Hakekat kerukunan adalah bagaimana setiap warga negara memiliki sikap toleran, menghargai, damai, santun, tenggang rasa yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam, kemudian terpancar dari kemauan untuk berinteraksi satu sama lain sebagai manusia tanpa tekanan dari pihak manapun (Ismail, 2019). Dalam mengembangkan sikap dan perilaku yang rukun dan damai setiap warga memiliki tanggung jawab yang sama. Baik individu, kelompok dan organisasi kemasyarakatan (ormas) atau lembaga sosial masyarakat memiliki peran dan kontribusi yang sama dalam menjaga dan memelihara kerukunan masyarakat. Organisasi kemasyarakatan memiliki peran yang lebih strategis dalam pembangunan demokrasi di Indonesia.

Organisasi sosial dan kemasyarakatan sebagai perwakilan suara masyarakat perlu bermitra dan berkolaborasi dengan pemerintah melalui Suku Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik sebagai institusi pemerintahan yang berperan melakukan fungsi pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan. Proses pembinaan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk mengatasi konflik yang mungkin timbul akibat interaksi sosial maupun konflik antar kelompok sosial, partai politik dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam menjaga dan memelihara kerukunan masyarakat dan antar umat beragama di Indonesia maka perlu didorong upaya-upaya strategis di tiga wilayah kerukunan yakni (1) kerukunan intern umat beragama, (2) kerukunan antar umat yang berbeda-beda agama, dan antara pemuka atau tokoh agama, (3) kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah melalui penguatan dasar-dasar kerukunan internal antar umat beragama, antar tokoh-tokoh agama dan masyarakat dan antara umat beragama dengan pemerintah sehingga terbentuk suatu harmonisasi kebersamaan dalam keberagaman. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dengan mendorong seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam upaya kemanusiaan dan demokrasi dan menunjung toleransi. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan penghayatan agama setiap warga masyarakat serta pengamalan agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama. Melakukan eksplorasi dan gerakan kemanusiaan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal yang diperkuat oleh spiritualitas dari masing-masing agama.

Antisipasi adalah salah satu dimensi pertama dalam ketahanan organisasi. Kemampuan antisipasi menggambarkan kapabilitas organisasi dalam melakukan pencegahan terhadap berbagai gangguan dan konflik (Yohanes, 2023:120). Antisipasi juga terkait dengan kemampuan mendeteksi perkembangan kritis suatu organisasi terhadap lingkungannya, serta bagaimana organisasi beradaptasi secara proaktif mencegah dan meminimalisir gangguan. Ini tidak berarti bahwa organisasi yang tangguh dapat mencegah setiap kegagalan atau krisis karena konflik atau krisis tidak pernah mengumumkan kedatangannya (Teixeira & Werther Jr., 2013).

Organisasi dan lembaga yang memiliki kapasitas dan kemampuan antisipatif yang baik dapat melihat dan menemukan hal atau kejadian yang tidak terduga dengan cara yang lebih cepat daripada yang lain. Organisasi yang memiliki

kemampuan antisipasi yang baik dapat secepatnya bereaksi terhadap perubahan, sementara organisasi yang lain masih menunggu dan melihat. Sistem organisasi yang baik membutuhkan kemampuan antisipasi untuk menghindari situasi yang mengancam atau setidaknya meminimalkan potensi konsekuensi negatif yang lebih besar. Model organisasi seperti ini mendefinisikan antisipasi sebagai “kemampuan untuk melihat ke bawah, untuk menentukan bagaimana lingkungan dan orang-orangnya berubah pandangannya untuk membuat keputusan serta mengambil tindakan di masa sekarang serta mempromosikan hasil yang diinginkan maupun menghindari gangguan di masa depan (Yohanes, 2023).

Dalam penelitian Yohanes (2023) ditemukan bahwa ada tiga tahap antisipasi yang perlu dimiliki oleh suatu organisasi seperti Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terdiri dari tiga kemampuan khusus: (1) kemampuan identifikasi untuk mengamati perkembangan internal dan eksternal, (2) kemampuan untuk mengidentifikasi perkembangan kritis dan potensi ancaman, (3) kemampuan melihat sejauh mungkin untuk mempersiapkan kejadian yang tidak terduga. Kemampuan antisipasi Kesbangpol dalam membangun potensi ketahanan yang dapat didefinisikan sebagai ketahanan yang saat ini belum terbukti atau terwujud artinya satu ketahanan antisipatif untuk membangun fondasi respons efektif terhadap situasi kritis. Kemampuan seperti ini sudah dilakukan dengan baik melalui kemampuan Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan aparat pemerintah daerah dan pihak keamanan dan tokoh masyarakat dan agama mencegah perluasan konflik dan tindakan kekerasan. Kemampuan antisipatif ini mewujudkan ketahanan yang mampu memberikan kontrol pada situasi tertentu dan tindakan, penyesuaian, serta keputusan penting harus dilakukan secara *real time*.

2.2.4 Konsep Toleransi

2.2.4.1 Pengertian Toleransi

Menurut Sutton (2019) toleransi adalah kemampuan dan kemauan orang itu sendiri dan masyarakat umum untuk berhati-hati terhadap hak-hak orang golongan kecil/minoritas dimana mereka hidup dalam peraturan yang dirumuskan oleh mayoritas. Lebih lanjut dijelaskan bahwa toleransi adalah sikap untuk menghargai

hak-hak kaum minoritas yang hidup dalam peraturan yang dibuat oleh kaum mayoritas. Toleransi menurut Sözer (2019) yaitu menerima sesuatu yang tidak disukai individu. Sözer menjelaskan bahwa untuk mengatasi atau menghindari konflik, individu perlu men-toleransi setidaknya beberapa hal yang sangat dibenci, tidak disetujui, atau tidak disukai seperti perbedaan etnis, keyakinan agama, gaya hidup, pandangan politik, dan preferensi pribadi. Sözer berpendapat bahwa tiap individu juga dapat memberikan kebebasan untuk orang lain dalam menjalankan kepercayaannya serta mengatur kehidupannya, selama dalam menjalankan hal tersebut tidak bertentangan dan melanggar dengan persyaratan atas terciptanya perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat (Sözer, 2019).

Dalam agama telah menggariskan dua pola dasar hubungan harus dilaksanakan oleh pemeluknya, yaitu: hubungan secara vertikal dan hubungan secara horizontal. Untuk mengembangkan sikap toleransi secara umum, dapat kita lihat terlebih dahulu dengan bagaimana kemampuan kita dalam mengelola dan menghadapi atas sikap perbedaan atau pendapat. Sesuatu yang berbeda pada orang lain hendaknya dipandang sebagai bagian yang dapat menjadi kontribusi bagi kekayaan budaya sehingga perbedaan-perbedaan yang ada akan memiliki nilai manfaat apabila dipahami.

Sehubungan dengan kehidupan bermasyarakat, sikap toleransi yang didorong dan dikembangkan akan menumbuhkan sikap saling menghormati antar sesama agar tercipta suasana tenang, damai dan tentram. Ciri-ciri suasana toleransi yang telah dipraktikkan dalam kehidupan kita, yaitu:

1. Membiarkan mereka memeluk agama sesuai keyakinan mereka.
2. Saling menghormati dan menghargai sesama.
3. Tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain.
4. Memberikan hak yang dimiliki oleh setiap individu.

2.2.4.2 Nilai-nilai Toleransi

Ada 2 (dua) nilai toleransi yang perlu ditegakkan, antara lain adalah toleransi agama dan toleransi sosial.

1. Toleransi agama

Bentuk toleransi ini dikaitkan dengan keyakinan atau akidah. Loyalitas dan keyakinan terhadap agama, dogma-dogma yang kebenarannya tidak dapat diganggu gugat sekalipun bertentangan dengan rasio atau logika. Segala sesuatu yang berasal dari agama adalah mutlak, dan mengatakan yang sebenarnya kepada orang lain agar mereka tidak tersesat. Asumsi ini memunculkan anggapan bahwa keyakinan selain keyakinannya sendiri salah dan berjalan ke arah yang salah

2. Toleransi Sosial

Dalam hal-hal yang berkenaan dengan kebaikan hidup bersama di dunia ini, Islam mengajak para pemeluknya untuk bersikap secara toleransi sosial atau dari segi masyarakat. Allah SWT tidak melarang umat Islam hidup bersama orang yang tidak seagama. mengingat toleransi sosial ini dalam masyarakat yang beragam seperti ras, tradisi, keyakinan maupun agama, ajaran Islam menegakkan kedamaian hidup dan bekerja sama sampai batas tertentu (Utami dalam Yuriska Juvanda, 2021)

2.2.4.3 Unsur-unsur Toleransi

Toleransi sebagai realitas yang dibentuk oleh nilai-nilai masyarakat itu sendiri. Unsur-unsur toleransi adalah:

1. Mengakui Hak Setiap Orang

Suatu sikap mental yang mengakui hak setiap orang dengan menentukan nasibnya. Tentunya sikap dan perilaku yang dilakukan tidak melanggar hak orang lain. Maka kehidupan masyarakat akan kacau. Negara tidak boleh menghindari individu atau mencegah mereka dalam memenuhi hak-hak mereka. Contoh: hak beragama, hak mengikuti hati nurani, hak menyatakan pendapat.

2. Menghormati Keyakinan Orang Lain

Landasan akan menghormati keyakinan orang lain berdasarkan kepercayaan, bahwa tidak benar ada golongan bersikeras memaksakan kehendaknya sendiri kepada orang lain.

3. Saling Mengerti

Tidak akan terjadi saling menghormati antara sesama manusia bila mereka tidak ada saling mengerti. Saling membenci, saling berebut pengaruh adalah salah satu akibat dari tidak adanya saling mengerti satu sama lain.

4. Setuju di dalam Perbedaan

Adalah perbedaannya tidak boleh ada permusuhan, Semua pemeluk agama harus meyakini kebenaran agama yang menerima sikap wajar dan logis, keyakinan akan kebenaran agama yang dinutnya ini tidak membuatnya merasa sendiri, melainkan ada perbedaan dengan agama orang lain (Maskuri dalam Yuriska Juvanda, 2021).

2.2.4.4 Ciri-ciri Sikap Toleransi

Sikap yang harus dihindari dalam mengembangkan sikap toleransi, yaitu:

1. Sikap fanatik berlebihan yang tidak mau menghargai orang lain.
2. Menganggap ajaran agamanya benar dan mencampurkan ajaran agamanya dengan ajaran agama lain.
3. Sikap apatis, membangun toleransi dalam kehidupan masyarakat yang mewujudkan suasana tenang (Nur Faiqoh, 2015:41)

2.2.4.5 Dasar Hukum Toleransi

Menjamin kemerdekaan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945): “Setiap orang bebas memeluk suatu agama, beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, meninggalkan wilayah Negara dan berhak kembali ke tanah air.” Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan beragama. Selain itu, dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia.

Selain itu, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan seluruh penduduk dalam menjalankan agamanya.

Adapun dasar pelaksanaan kerukunan hidup antar umat beragama di Kota Jakarta Timur mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 170 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama.

2.2.4.5 Prinsip-prinsip Toleransi dalam Kerukunan Hidup Beragama

Dalam menjalankan toleransi beragama, kita harus memiliki sikap atau prinsip untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian. Prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut:

1. Kebebasan Beragama
Hak asasi manusia yang paling esensial dalam hidup adalah hak kebebasan beragama. Kebebasan beragama sering disalahartikan dalam berbuat sehingga manusia ada yang mempunyai agama lebih dari satu. Kebebasan memeluk

agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Firdaus Arifin, 2019).

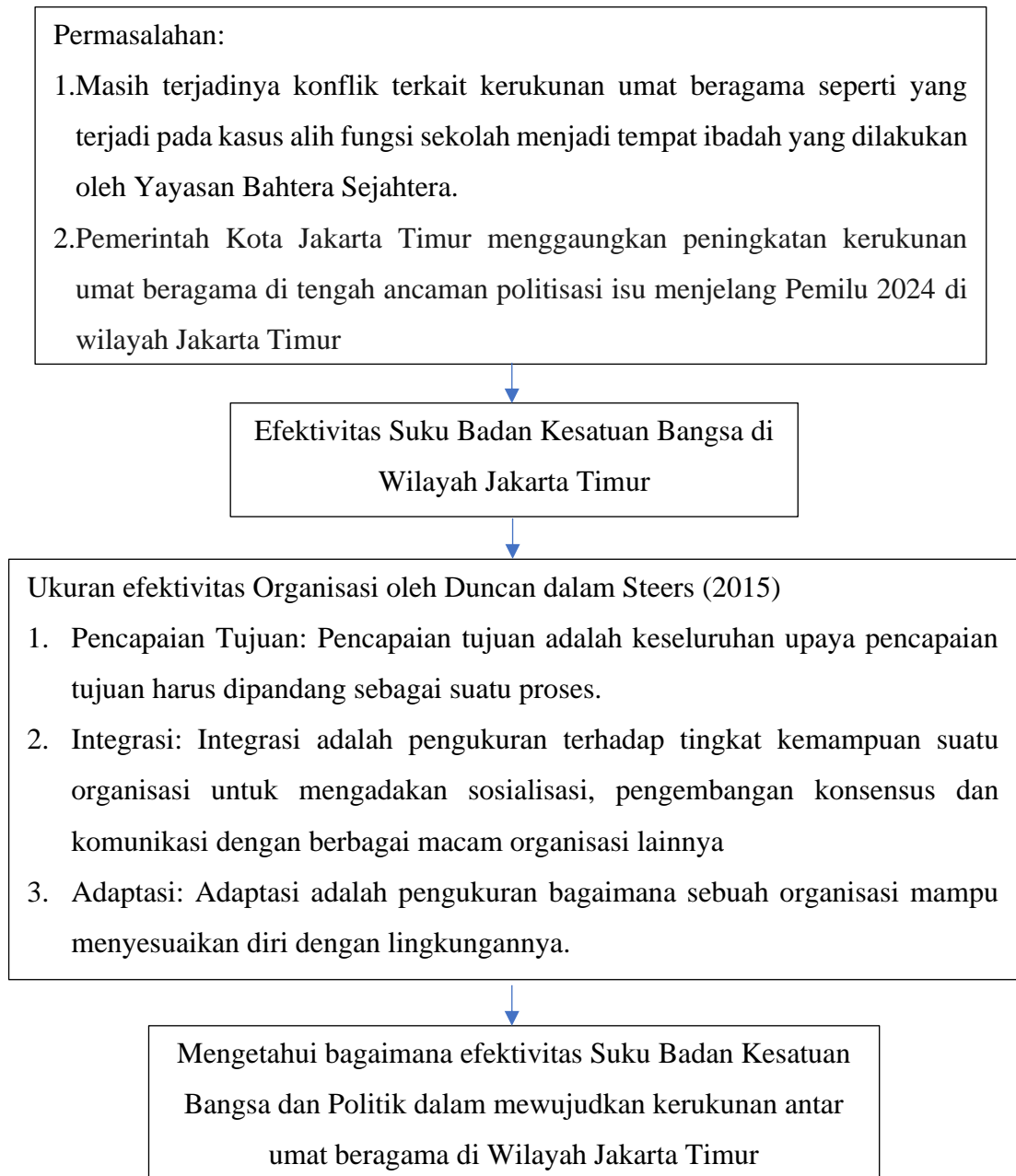
2. Penghormatan dan Eksistensi Agama Lain

Kebebasan beragama berarti menghormati keberadaan agama lain dengan pengertian bahwa menghormati keberadaan agama lain, dengan pengertian bahwa mereka menghargai keragaman dan perbedaan ajaran masing-masing agama dan kepercayaan yang ada. Salah satu ajaran penting dalam Islam yang perlu diketahui oleh semua kalangan adalah sikap saling menghormati, baik kepada mereka yang seagama ataupun yang tidak. Bentuk penghormatan dalam hal ini adalah dengan cara tidak mengganggu semua aktivitas orang lain, membiasakan diri untuk saling membantu, saling menyapa, dan hal-hal lain yang bisa semakin mempererat hubungan antar sesama manusia

2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:95) kerangka berpikir merupakan konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagaimana masalah yang penting. Peran Suatu organisasi berperan efektif bila memenuhi tiga hal utama yaitu (1) melakukan pengorganisasian secara efisien, (2) menjaga keseimbangan dalam struktur sosial, dan (3) tetap fleksibel atau adaptif dengan perubahan. Peran ini berarti Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu memiliki kapasitas dan kemampuan dalam menciptakan korelasi sub-sub sistem sosial antar pribadi dan kelompok dalam masyarakat (Duncan, 1973).

Dalam penelitian ini, fokus yang diteliti adalah efektivitas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mewujudkan kerukunan umat beragama serta faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam rangka mewujudkan kerukunan umat beragama di Jakarta Timur. Maka untuk mengetahui bagaimana efektivitas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama, penelitian ini menggunakan teori menurut Duncan yang secara eksplisit menerangkan efektivitas organisasi diukur dari 3 (tiga) indikator yaitu: pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi, dimana dari ketiga indikator ini akan diketahui sejauh mana efektivitas dari Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjaga kerukunan umat beragama di wilayah Jakarta Timur.



Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian